

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaannya memiliki tiga indikator konsep parlemen modern dan terbuka yaitu: Pertama, transparansi informasi dibuka seluas-luasnya. Kedua, teknologi komunikasi digital digunakan dengan optimal. Ketiga, fungsi representasi dilaksanakan dengan baik.

Sekarang konsep perkembangan di Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo sebagai Parlemen Modern dan Terbuka adalah :

- 1) DPRD Setiap minggu melakukan program dialog, dialog kopi pagi atau kopi sore, dan tempatnya itu dilaksanakan di teras kantor DPRD Provinsi Gorontalo, disitu para anggota dewan akan sharing dengan beberapa tokoh masyarakat.
- 2) DPRD melakukan pengawalan serta memfalisitasi kegiatan anggota dewan per dapil untuk menjaring aspirasi masyarakat.
- 3) DPRD melakukan road show ke seluruh media-media, di dalam road show tersebut yang akan dilakukan adalah membangun kerja sama atau komunikasi dengan stasiun-stasiun, baik itu media cetak maupun media elektronik.

2. Faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan DPRD Provinsi Gorontalo sebagai Parlemen Modern, yaitu diantaranya :

1) Sumber Daya Manusia Terkait Informasi Komunikasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk sisi lemahnya menuju broadcastingnya itu masih kurang, dan harus dibutuhkan reporter.

2) Penggunaan Fasilitas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo saat ini kekurangan fasilitas untuk mewujudkan DPRD sebagai parlemen yang modern dan terbuka, dimana DPRD belum memiliki Mobil Operasioanal untuk turun langsung ke lapangan, nyatanya DPRD itu sendiri masih menggunakan mobil pimpinan.

3) Kekurangan Anggaran

Seperti yang sudah disinggung diatas, dimana fasilitas yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Gorontalo itu masih belum tercapai, di karenakan masih kekurangan dengan kondisi anggarannya.

4) Sarana dan Prasarana

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk dukungan sarana dan prasarana itu belum memadai, karena penggunaan fasilitas seperti *website* di DPRD itu masih sebatas penggambaran untuk memperlihatkan setiap kegiatan anggota DPRD dan DPRD Provinsi Gorontalo juga belum memiliki ruang diskusi tersendiri untuk masyarakat dapat menyampaikan keluhan ataupun aspirasi mereka kepada tiap-tiap anggota dewan per dapilnya.

## 5.2 Saran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menjadi parlemen yang interaktif dengan konstituennya demi mendapatkan peningkatan dukungan publik terhadap program-program kerjanya. Dimana dalam prosesnya tentu diperlukan upaya yang berkesinambungan dari DPRD untuk konsisten memberikan informasi secara langsung, akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dari dalam kegiatan DPRD.

Masukan dari penulis juga mengaharapkan DPRD Provinsi Gorontalo harus terus memantapkan diri dengan cita-cita mewujudkan DPRD sebagai parlemen modern yang akuntabilitas terhadap masyarakatnya, dengan berbasiskan prinsip transparansi, teknologi informasi, dan representasi rakyat. DPRD diharapkan untuk dapat menyediakan segala fasilitas yang lengkap seperti penggunaan *website*, mobil operasional, perpustakaan serta ruang diskusi untuk masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan anggota dewan per dapilnya untuk menjaring aspirasi dan keluhan dari masyarakat itu sendiri.

Kedepannya, tentu konsep parlemen modern ini harus terus didorong dan terus disosialisasi serta dipublikasikan agar konsep ini dapat berjalan bagi kebaikan masyarakat serta memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia, membangun rasa cinta tanah air, bahkan memperkuat kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Referensi :

- Asshidiqie Jimly. 2006. *JILID II Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Jakarta.
- Basyiruddin, Usman dan Syafruddin, Nurdin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Ciputat Press : Jakarta.
- Birch A.H dikutip dari Tambunan A.S.S. 2001. *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Puporis Publisher : Jakarta.
- Budiarjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik "Edisi Revisi"*, Granmedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Fajar Mukti ND. 2013. *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fatmawati. 2010. *Struktur Fungsi dan Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral, Studi Perbandingan Antar Indonesia dan Berbagai Negara*. UI Press : Jakarta.
- Huda Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press : Yogyakarta.
- Isra Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Pengertian Implementasi*. Pustaka Progressif.
- M.D Mahfud Moh. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta : Bandung.
- Napitupulu Paimin. 2005. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR: Kajian di DPRD DKI Jakarta*, Alumni : Bandung.
- Rosari W. Renati. 2013. *Kamus PPKn*. Aksarra Sinergi Media : Surakarta..

Sanur L. Debora. 2015. *Urgensi Membangun Parlemen Modern*. P3DI Setjen DPR RI : Jakarta.

Sirajuddin. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press : Malang.  
Sparingga Daniel. 2009. *Demokrasi Sejarah, Konsep dan Praktiknya*, dalam Andy Ramses dan La Bakry (ed). *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia : Jakarta.

Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*: Alfabeta : Gorontalo.

Wahab Abdul, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang Press : Malang Universitas Muhammadiyah.

#### **Undang-Undang :**

DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; yang merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nomor: 08/BURT/DPR RI/I/2010-2011 tentang Penetapan Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan pengaduan Masyarakat DPR RI.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau (UU MD3).

#### **Jurnal :**

Gray, R., Bebbington, Jan and Collison, David. 2006. NGOs, *Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19, no. 3.

Hardhini Victoria Veronica, Asy'ari Hasyim, Tyesta A.L.W Lita. 2016. Diponegoro Law Journal "Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Parlemen Modern dan Terbuka", Volume 5, Nomor 3. Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro.

Kluvers, R. and Tippett, J. 2010. *Mechanisms of accountability in local government: an exploratory study*, International Journal of Business and Management, Vol. 5 No.7.

Lincoln Dahlberg. 2011. *Re-Constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions'*, Online Journal: Sage Publication.

Mansbridge, Jane. 2003. *Rethinking Representation*, American Political Science Review, Vol. 97, No. 4. Cambridge: Harvard University.

#### **Internet/Website :**

Anonim, "Governing Systems and Executive-Legislative Relations": Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems, <http://www.undp.org/governance/docs/parl-pub-govern.htm>. Diakses tanggal 11 Januari 2008.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-gorontalo>.

Igirisa Ferdy, DPRD Provinsi Gorontalo dan Humas & Protokol Setwan "Menuju Parlemen Modern yang Terintegritas", <https://dprd.gorontalo.prov.go.id>. Diakses tanggal 30 Agustus 2017.

Parliament Opening. org, *Declaration on Parliamentary Openness*, (online), <http://www.openingparliament.org/declaration>. Diakses tanggal 3 Desember 2015.

Prayudi, "DPR RI Menuju Parlemen Modern", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9635>, Diakses tanggal 1 Oktober 2015.

Society Max Planck, "Ten Years After the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities", [http://openaccess.mpg.de/mission-statement\\_en](http://openaccess.mpg.de/mission-statement_en), Diakses tanggal 3 Desember 2015.

Suwarso Reni, Ph.D, Ilmuwan Politik, Direktur CEPP FISIP-UI, "DPR RI Adopsi Konsep Parlemen Modern", <http://cepp.fisip.ui.ac.id/dpr-provinsi-adopsi-konsep-parlemen-modern/>. Diakses tanggal 06 Desember 2016.

#### **Majalah :**

Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP-UI, *DPR RI: Parlemen Modern Yang Menabuh Genderangnya Sendiri* 2014. Lihat European Commission, "Paper Review: The Future of Parliamentary Democracy: Transition and

Challenge in European Governance”. 2000. *Green Paper for the Conference of the European Union*, Secretariat General European Commission, Brussel.

Kerangka Acuan Kegiatan Bekerja Membangun Parlemen Modern, Center for Election and Political Party FISIP-UI, 2015. Lihat, Hansard Society. 2011. *Innovation and Good Practice from Around the World : Parliaments and Public Engagement*.

Prayudi. 2015. *DPR RI Menuju Parlemen Modern*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika : Jakarta Pusat.

Suwarso Reni. 2015. Parlemenarian. *DPR Menuju Parlemen Modern*. Parliamentaria edisi 122 TH. XLV, Jakarta.

#### **Wawancara :**

Wawancara dilakukan antara saya dengan Bapak Firman F. Soenge, SE pada tanggal 5 Maret 2018 Pukul 10.30 WITA.

Wawancara dilakukan antara saya dengan Bapak Daryatno Gobel, S.IP pada tanggal 5 Maret 2018 Pukul 13.50 WITA.

Wawancara dilakukan antara saya dengan M. Hidayat H. Bouty, SE pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 11.00 WITA.

Wawancara dilakukan antara saya dengan Dr. H. AW. Thalib pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 14.00 WITA.

Wawancara dilakukan antara saya dengan Narasumber, Ibu Yulin D. Limonu S.H., M.H pada tanggal 12 Maret 2018 Pukul 15.30 WITA.

Wawancara dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak Nikson Entengo, S. IP, M.SI pada tanggal 13 Maret 2018 Pukul 10.00 WITA.

Wawancara dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak Ferdi Igirisa pada tanggal 14 Maret 2018 Pukul 14.30 WITA.

Wawancara dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak Prama A. Bilondu pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 15.30 WITA.

Wawancara dengan masyarakat Provinsi Gorontalo Terkait Pelaksanaan Parlemen Modern di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.